

## **Inclusive economic growth in Indonesia: Analysis of the determinants of Inclusive economic growth in Indonesia**

Lian Wira Manuel Maharaja, Nova indah Lumbantoruan, Gregorius Daniel Dwitama

Faculty of Engineering, UMN Program - Master of Information System,  
Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang 15810, Indonesia

*lian.wira@student.umn.ac.id; [nova.indah@student.umn.ac.id](mailto:nova.indah@student.umn.ac.id); gregorius.daniel@student.umn.ac.id*

**Abstract.** Economic growth can be categorized into inclusive and exclusive growth. Inclusive growth is often defined as economic growth focused on creating economic opportunities that are accessible to all. It emphasizes expanding economies of scale, improving access to economic assets, expanding markets, and ensuring equality of opportunity for future generations. Achieving economic inclusion requires a deep understanding of the factors that influence economic inclusion in Indonesia, which demands participation from all sectors to drive growth that reduces poverty, inequality and unemployment. Economic growth is crucial for long-term economic development, defined as a long-term increase in output per capita. Indonesia's economy, as measured by GDP, has fluctuated, with a contraction of 2.07% in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Ensuring equitable economic development remains important, with infrastructure development needing to be balanced with the development of quality human resources. Addressing regional disparities and sector inequality is essential for inclusive growth. This study aims to analyze the distribution of inclusive economic growth in Indonesia, identify influencing factors, determine barriers, and examine strategies to prevent economic and social disparities. Using annual secondary data from 2015 to 2021 across 34 provinces, factors such as education level, public and private investment, unemployment rate, and public health are shown to have a significant influence on inclusive economic growth. This study recommends increasing access and quality of education, improving basic health services, and providing incentives to attract private investment in provinces with low GRDP per capita as strategies to promote more equitable inclusive economic growth across Indonesia. This research provides valuable insights for policymakers, researchers, and civil society organizations to devise effective strategies for inclusive economic and social development in Indonesia.

**Keywords:** Data, Ekonomi Inklusif, GRDP per Kapita, tingkat kemiskinan

### **1. Introduction**

Pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif dan pertumbuhan ekonomi eksklusif. Pertumbuhan inklusif sering dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada penciptaan peluang ekonomi dan dapat diakses oleh semua (Ali and Zhuang, 2007). Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang fokus pada perluasan skala ekonomi, memperluas akses terhadap aset perekonomian dan berhasil memperluas pasar serta menciptakan pemerataan peluang untuk generasi Selanjutnya (M.H. Suryanarayana, 2008). Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif telah tercermin dalam inisiatif

Kementerian PPN/Bappenas untuk mengembangkan indeks ekonomi inklusif (Bappenas,2024). Namun, untuk mencapai inklusi ekonomi diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi ekonomi di Indonesia yang menuntut adanya partisipasi bagi semua pihak agar turut andil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika perekonomian mulai tumbuh maka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran akan mengalami penurunan (S. Klasen,2010).

Pertumbuhan ekonomi merupakan isu krusial dalam perekonomian jangka panjang. Fenomena ini menjadi sorotan utama di dunia modern. Proses ini, dikenal sebagai Modern Economic Growth, didefinisikan sebagai peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan proses peningkatan produksi jasa dan barang dalam aktivitas ekonomi masyarakat, Untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan permasalahan sosial, beberapa organisasi internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF), dan United Nations Development Program (UNDP) memiliki seperangkat variabel dan variabel. Formula untuk mengukur alternatif pertumbuhan ekonomi yang diciptakan menekankan pada kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi di semua lapisan masyarakat (Bappeda,2024). Perekonomian Indonesia tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp11.540,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp45,2 juta atau US\$3,377.1. Ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,38 persen. Sedangkan Ekonomi Indonesia triwulan IV-2016 bila dibandingkan triwulan 2015 mengalami kontraksi sebesar 1,77 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 21,24 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto. Bahkan Ekonomi Indonesia 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07 persen (B.P.S Indonesia, 2015).

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Indonesia pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, menuju 2015, terjadi penurunan sebesar 0,3%, namun kemudian pulih pada 2016 dan stabil hingga 2019. Namun, pada 2020, terjadi penurunan drastis sebesar (-2,1%) sebagai dampak langsung dari pandemi Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia pada awal tahun tersebut. Pandemi ini menyebabkan pembatasan pergerakan orang dan barang, menghambat produksi dan distribusi (Y.R. Pratiwi, 2022). Data dari ADB menunjukkan bahwa meskipun mengalami fluktuasi, Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi secara stabil dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Indonesia harus keluar dari jebakan paradigma ekonomi eksklusif yang hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi tinggi dengan mendorong pertumbuhan sektor sekunder (manufaktur) dan tersier atau jasa (Camille,2023) Sektor primer (pertanian) kerap tertinggal, padahal menyerap banyak tenaga kerja. Berdasar data Kementerian PPN/Bappenas pada 2019, indeks pembangunan inklusif Indonesia 5,89, meningkat dibandingkan dengan 2018 (5,75) dan 2017 (5,75). Nilai indeks pilar I (5,48), pilar II (6,57), dan pilar III (6,09). Skala skor indeks dari 0 sampai 10. Provinsi DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta tertinggi 7,82, 6,77, dan 6,61. NTT dan Papua terendah 4,92 dan 3,21.

Poin terpenting dalam ekonomi inklusif adalah pemerataan pembangunan ekonomi yang dinikmati seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kementerian PPN/ Bappenas berinisiatif menstandarkan kerangka kebijakan pembangunan ekonomi inklusif dengan mengembangkan indeks ekonomi inklusif (Inclusive Economic Growth Index). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif (Bapedda,2023). Pertumbuhan ekonomi tinggi saja ternyata belum cukup karena hanya mengukur pertumbuhan PDB, kurang

memperhatikan pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2020 naik menjadi 10,19 persen. Sebanyak 27,55 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan (Rp 458.947 per kapita per bulan). Persentase penduduk miskin terbesar tercatat di Papua (26,8 persen), Papua Barat (21,7 persen), dan NTT (21,21 persen). Rasio ketimpangan (gini) per September 2020 sebesar 0,385, meningkat dari 0,380 pada September 2019. Tanpa pemerataan kualitas, hampir tidak mungkin pembangunan infrastruktur besar-besaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai (K.S. Negara).

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi inklusi ekonomi adalah disparitas antar wilayah yang masih cukup tinggi. Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam tingkat pembangunan ekonomi antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Pulau Jawa dengan Ibukota Jakarta masih mendominasi kontribusi terhadap perekonomian nasional, sedangkan wilayah timur seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku masih tertinggal (K.Anggaran,2020). Selain disparitas wilayah, ketimpangan juga terlihat dalam struktur lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja justru memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDB nasional (bappeda,2017). Sebaliknya, sektor industri dan jasa yang kurang menyerap tenaga kerja justru berkontribusi besar. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam produktivitas dan pendapatan antar sektor ekonomi. Indeks Pembangunan ekonomi Inklusif di Indonesia terdapat 3 Pilar,yaitu: Pilar pertama adalah Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian, Pilar kedua adalah Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan dan pilar terakhir adalah perluasan akses dan kesempatan (Kemenkeu, 2020).

Penelitian ini berupaya untuk menjawab beberapa pertanyaan penting terkait pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia, seperti melihat persebaran pertumbuhan ekonomi inklusif, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan inklusif, mengetahui provinsi-provinsi dengan pertumbuhan inklusif tertinggi dan terendah, serta cara merancang strategi dalam upaya pencegahan kesenjangan ekonomi dan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persebaran ekonomi inklusif di Indonesia, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan inklusif, mengetahui faktor yang menghambat pertumbuhan inklusif, mengetahui provinsi yang mengalami pertumbuhan inklusif tertinggi dan terendah di Indonesia, serta merancang strategi dalam upaya pencegahan kesenjangan ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahunan mulai tahun 2015 hingga 2021, yang mencakup seluruh 34 provinsi di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki aspek pertumbuhan ekonomi inklusif dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi para pembuat kebijakan di Indonesia, sebagai wawasan berharga dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini juga menjadi sumber referensi penting bagi peneliti dan akademisi yang tertarik dalam studi tentang pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pembangunan inklusif di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari informasi yang dihasilkan, sehingga dapat menyusun strategi dan program-program yang lebih efektif dalam upaya mereka untuk meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi.

## **2. Literature Review**

### **2.1 Teori**

#### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan nilai dan volume produksi barang dan jasa dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Ini mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan produksi dan perekonomian nasional. Fenomena ini sering disebut sebagai Modern Economic Growth, yang merupakan masalah jangka panjang dalam perekonomian dan sangat penting dalam konteks global saat ini. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, penting untuk memperhatikan output per kapita dalam jangka panjang. Ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemampuan untuk mengonsumsi barang dan jasa, serta meningkatnya daya beli. Pertumbuhan ekonomi juga berhubungan dengan peningkatan produksi barang dan jasa secara keseluruhan dalam perekonomian masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tercermin dalam peningkatan hasil produksi dan pendapatan nasional, yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, upaya pembangunan dilakukan secara berencana dan bertahap, dengan tetap memperhatikan upaya pemerataan dan stabilitas (K.S.Negara).

#### **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang berfokus pada penciptaan peluang ekonomi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi atau hambatan struktural. Hal ini meliputi penyediaan lapangan kerja, akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan sumber daya ekonomi lainnya. Pertumbuhan inklusif juga menekankan pada perluasan skala ekonomi dengan melibatkan seluruh sektor dan wilayah, memperluas akses terhadap aset perekonomian seperti infrastruktur dan sumber daya alam, memperluas pasar domestik dan global, serta menciptakan pemerataan peluang bagi generasi mendatang melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi inklusif tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan manfaat pertumbuhan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkelanjutan (Zasriati M,2022).

#### **2.1.3 Pendapatan Perkapita**

Pendapatan per Kapita adalah ukuran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk dalam suatu negara. Untuk menghitung pendapatan per kapita, total pendapatan nasional suatu negara dibagi dengan jumlah penduduknya. Hal ini sering digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi tingkat pembangunan suatu negara, dimana semakin tinggi pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Pendapatan per kapita juga dapat digunakan untuk menilai standar hidup dan kualitas hidup penduduk di suatu daerah. Penghitungan pendapatan per kapita mencakup semua anggota populasi, termasuk pria, wanita, anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir. Ini berbeda dengan pengukuran lain seperti pendapatan rumah tangga, yang hanya menghitung orang yang tinggal di bawah satu atap sebagai satu unit keluarga, dan pendapatan keluarga yang terkait dengan hubungan kelahiran, perkawinan, atau adopsi yang tinggal di bawah atap yang sama (Sri Hartati,2021).

#### **2.1.4 Kesenjangan Ekonomi antar wilayah**

Kesenjangan ekonomi antarwilayah merupakan fenomena umum dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Meskipun kebijakan pembangunan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, seringkali malah memperburuk kesenjangan antar wilayah. Hal ini terjadi karena beberapa wilayah berkembang cepat sementara yang lain tertinggal, menyebabkan migrasi penduduk ke wilayah maju dan menimbulkan masalah sosial-ekonomi. Teori Neoklasik menjelaskan bahwa kesenjangan ini cenderung meningkat pada awal pembangunan karena daerah maju lebih mampu memanfaatkan peluang ekonomi. Namun, di negara maju, kesenjangan cenderung berkurang karena pembangunan lebih merata. Faktor

mobilitas tenaga kerja dan modal juga mempengaruhi kesenjangan, di mana pada awal pembangunan, faktor-faktor ini tidak merata antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mengurangi kemiskinan secara langsung, dan pemerataan ekonomi diperlukan untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (R, Amala).

## **2.2 Penelitian Terdahulu / Tinjauan Pustaka**

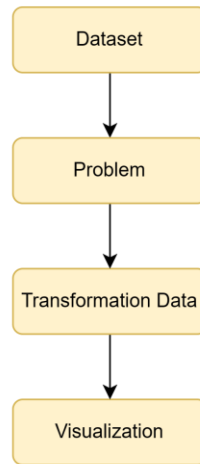
Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Pertama, studi yang dilakukan oleh Yuniar Hartati (2021) berfokus pada analisis pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia dalam rentang waktu 2010-2019. Melalui Model Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR), penelitian ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif belum konsisten tercapai selama periode tersebut. Dari faktor-faktor yang diteliti, hanya pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Selanjutnya, Richard Samans, Jennifer Blanke, Gemma Corrigan, dan Margareta Drzeniek (2015) mengidentifikasi kesenjangan utama dalam pencapaian pertumbuhan inklusif, yaitu kurangnya pedoman kebijakan konkret dan indikator kinerja yang disepakati secara internasional. Dengan menggunakan The OECD's Inclusive Growth Framework, penelitian ini menemukan bahwa semua negara memiliki ruang untuk perbaikan dengan kinerja yang bervariasi. Tidak ada negara yang unggul di semua sub-pilar, meskipun beberapa mendekati kinerja terbaik. Pendekatan kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi unik tiap negara.

Pada tingkat regional, Hendra Andy Mulia Panjaitan (2019) melakukan kajian mengenai dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan konsep pertumbuhan inklusif yang menekankan pada pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara belum bersifat inklusif. Meskipun mampu mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut justru memperburuk ketimpangan pendapatan dan tidak menciptakan kesempatan kerja yang memadai. Terakhir, Ahmad Soleh (2023) menyoroti tantangan signifikan dalam mengurangi kemiskinan secara efektif di Indonesia, meskipun pertumbuhan inklusif telah menjadi inti strategi kebijakan. Dengan menggunakan kerangka pertumbuhan inklusif OECD dan indikator seperti Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR), penelitian ini mengungkapkan perlambatan pengurangan kemiskinan di Indonesia sejak 2010-2019 dan dampak negatif pandemi Covid-19 pada 2020 yang memperburuk tingkat kemiskinan. Temuan ini menegaskan perlunya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan kebijakan yang terarah untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

## **3. Research Methods**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi persebaran pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia, serta menganalisis faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Sumber dataset ini berasal dari repositori data sekunder, yaitu Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJK). Dataset ini terdiri dari titik-titik data tahunan yang mengacu pada definisi pertumbuhan ekonomi inklusif dari United Nations Development Programme (UNDP), yang menekankan pentingnya pertumbuhan yang bermanfaat bagi seluruh segmen masyarakat, dengan fokus khusus pada lapangan kerja sebagai indikator utama inklusivitas. Badan Pusat Statistik mendefinisikan pertumbuhan PDB per orang yang dipekerjakan sebagai tingkat pertumbuhan PDB riil rata-rata relatif terhadap jumlah orang yang dipekerjakan setiap pertumbuhan PDB yang lebih tinggi per orang yang dipekerjakan berhubungan dengan pertumbuhan inklusif yang lebih besar. PDB riil dipilih sebagai metrik karena fokus pada tingkat provinsi, sehingga membantu menghilangkan pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Alur Penelitian



***Gambar 1.1 Alur Penelitian***

1. Dataset : dimulai dari proses pencarian dataset yang relevan dengan topik dan mengidentifikasi masalah apa yang terdapat pada dataset. Dataset penelitian ini mengenai pertumbuhan ekonomi eksklusif di Indonesia. Proses penelitian ini dimulai dengan pencarian dataset yang relevan dengan topik pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Dataset yang digunakan mencakup berbagai variabel penting yang memungkinkan analisis mendalam mengenai berbagai aspek ekonomi dan sosial di setiap provinsi di Indonesia.
2. Problem : masalah yang diperoleh nantinya akan diolah untuk mencapai tujuan dan akan memberikan dampak.
3. Transformation Data : Data yang diolah kami kategorikan dan analisa menjadi data kompleks yang dapat dimengerti
4. Visualization : visualisasi yang dipakai berupa maps, grafik, plot, maupun diagram.

## Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari Kaggle. Data ini mencakup indikator ekonomi seperti PDB, tingkat pengangguran, indeks kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Data ini memberikan wawasan tentang pengalaman langsung dan persepsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Lalu, data diolah dan dibersihkan untuk memastikan keakuratan, menghilangkan duplikasi, dan menangani data yang hilang. Setelah itu, data dikategorikan dan diberi kode untuk memudahkan analisis tematik. Langkah-langkah ini memastikan bahwa dataset yang digunakan dalam visualisasi memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang pertumbuhan inklusif di Indonesia.

## 4. Results & Discussion

### Tingkat GRDP per Capita Indonesia

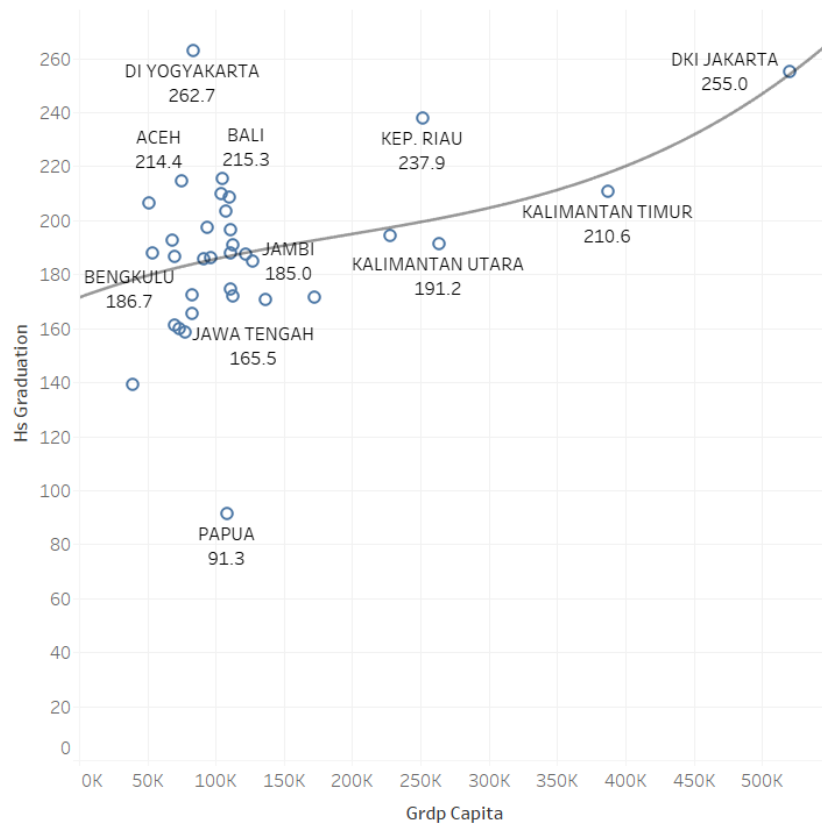


**Gambar 4.1 Map Tingkatan GRDP capita/Provinsi**

Peta ini menunjukkan Tingkatan GRDP Capita per provinsi dari yang paling banyak hingga yang sedikit. Wilayah cakupan hanya di negara Indonesia. GRDP per kapita atau Gross Regional Domestic Product per kapita adalah ukuran nilai tambah bruto yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi di provinsi dalam periode waktu, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada wilayah/daerah tersebut. Indikator ini menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu wilayah/daerah dalam setahun dari hasil produksi barang dan jasa di wilayah tersebut [30]. GRDP per kapita merupakan versi regional dari GDP per kapita yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara secara keseluruhan [32]. Dari map tersebut Dapat Dilihat Provinsi Yang memiliki GRDP kapita yang tinggi.

Tingkat pendidikan menjadi faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan peluang kerja dan penghasilan, mendorong inovasi dan kewirausahaan, serta membuat masyarakat lebih terbuka terhadap ide baru dan terampil mengadopsi teknologi baru. Tingkat pendidikan yang baik juga terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dengan masyarakat berpendidikan tinggi cenderung lebih mampu merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan yang efektif dan merata, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

### Tingkat Pendidikan vs. GRDP per Kapita

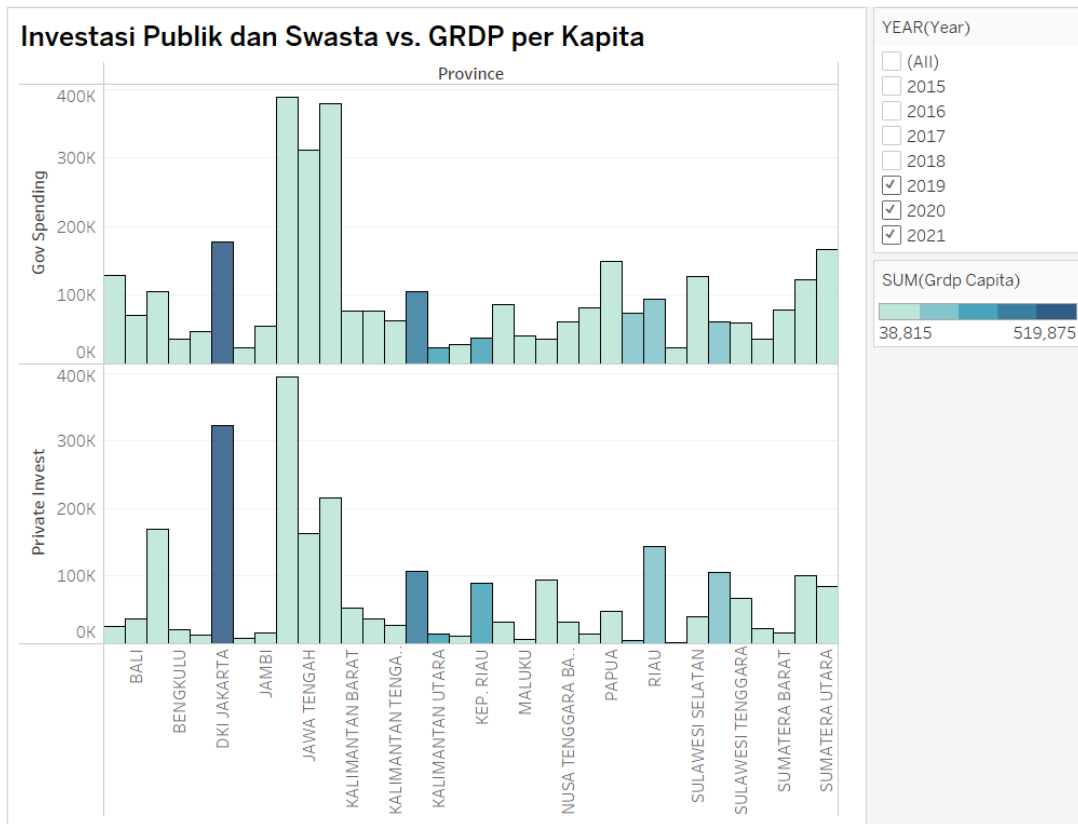


**Gambar 4.2 Tingkat Pendidikan Terhadap GRDP/Capita**

Gambar diatas menunjukkan Tingkat Pendidikan di Indonesia terhadap GRDP per kapita atau tingkat penghasilan per kapita. Persentase tingkat kelulusan menunjukkan DI Yogyakarta yang memiliki tingkat kelulusan terbanyak namun masih memiliki GRDP per kapita yang rendah, berbeda dengan DKI Jakarta yang memiliki Tingkat Kelulusan tertinggi kedua setelah DI Yogyakarta dan memiliki GRDP per kapita paling Tinggi dibanding Provinsi lainnya. Sementara Papua yang Memiliki Tingkat Kelulusan paling rendah namun untuk GRDP per kapita paling rendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Investasi publik dan swasta merupakan faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Investasi publik seperti infrastruktur, fasilitas pendidikan-kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses layanan dasar, serta mendukung ekonomi di daerah tertinggal. Sementara investasi swasta penting untuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, inovasi, dan transfer teknologi. Kombinasi investasi publik-swasta yang tepat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, menciptakan iklim usaha kondusif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.



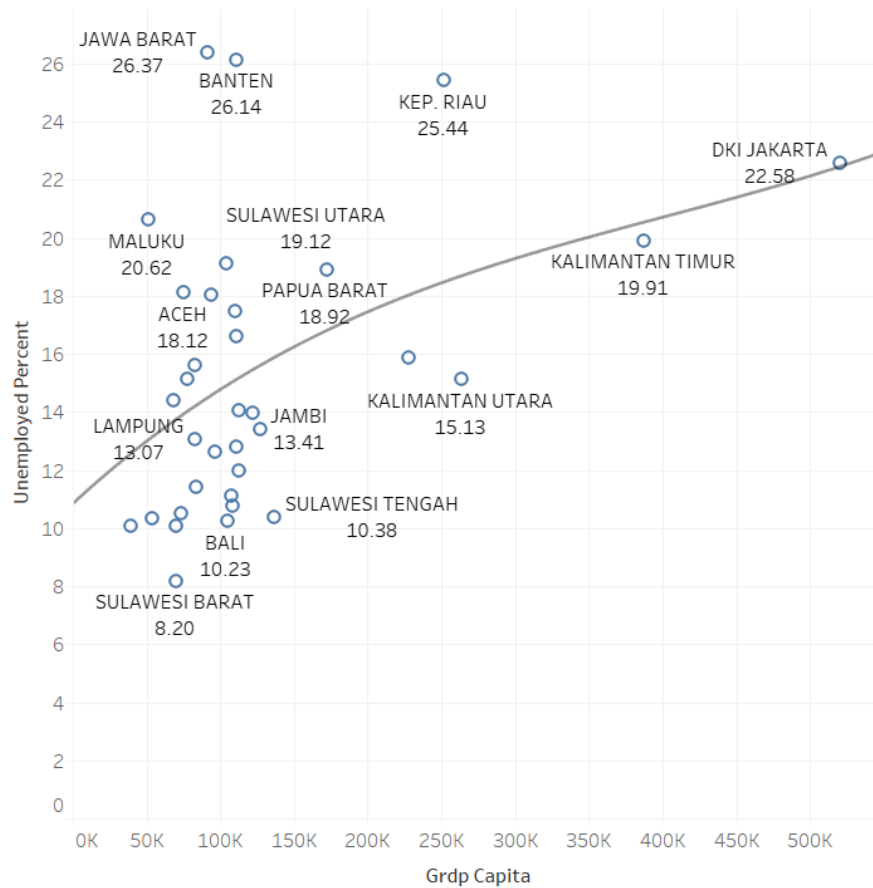


**Gambar 4.3 Investasi Publik dan swasta Terhadap GRDP/Capita**

Pada Diagram diatas dapat diketahui Provinsi mana yang memiliki Gov Spending dan Private Invest paling banyak. Gov Spending adalah total belanja pemerintah di provinsi tersebut sedangkan Private Invest adalah Total investasi swasta di provinsi tersebut. Diagram bar menunjukkan Jawa Barat memiliki Gov Spending paling Tinggi dan Private Invest paling tinggi namun masih memiliki jumlah GRDP/kapita yang rendah. Berbeda jika dibandingkan dengan Kalimantan Timur yang memiliki GRDP/kapita tertinggi kedua namun memiliki Gov Spending dan Private Invest 100 ribu.

Selanjutnya, dengan terbukanya lebih banyak lapangan kerja dari investasi publik dan swasta, tingkat pengangguran pun dapat ditekan. Peran ganda investasi publik dan swasta ini berkontribusi pada peningkatan GRDP per kapita secara berkelanjutan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan pendapatan, akses memadai terhadap layanan dasar, dan terbukanya kesempatan ekonomi yang lebih luas.

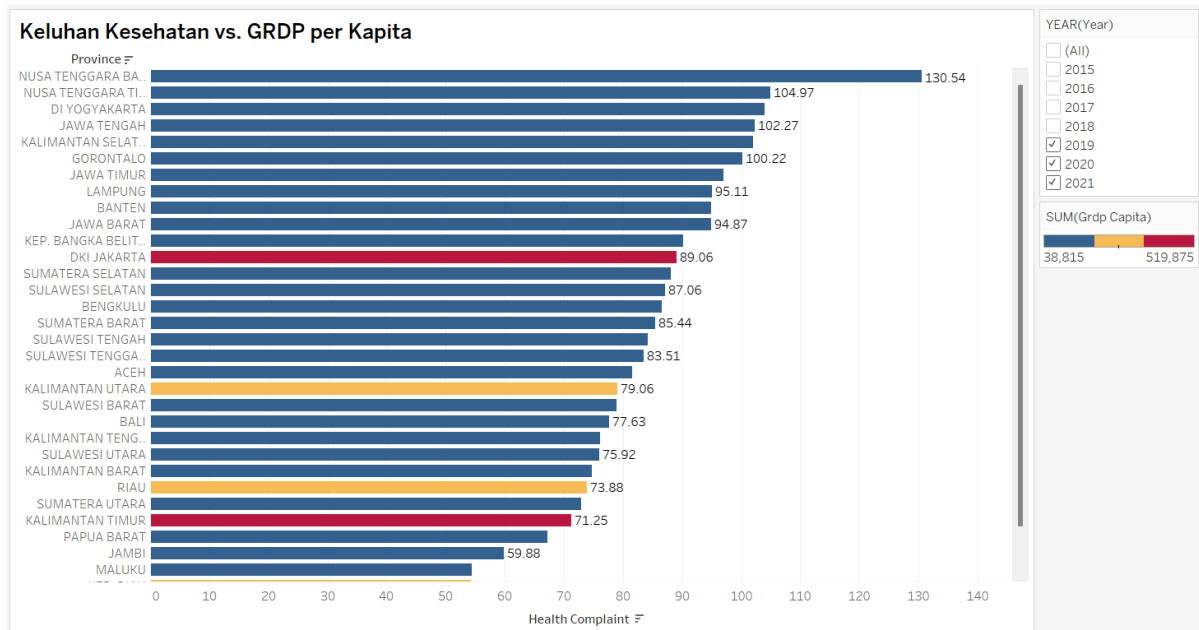
### Scatterplot Tingkat Pengangguran vs. GRDP per Kapita



**Gambar 4.4 Tingkat Pengangguran Terhadap GRDP/Capita**

Pada Scatterplot diatas tingkat pengangguran paling tinggi adalah Provinsi Jawa Barat, dimana Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki GRDP per kapita yang rendah meskipun Private Invest di provinsi tersebut tinggi namun juga menjadi Provinsi dengan Private Invest paling tinggi dibanding dengan provinsi lain. Untuk DKI Jakarta meskipun memiliki jumlah GRDP per kapita tertinggi akan tetapi juga menjadi Provinsi ke empat pengangguran tertinggi. Untuk Sulawesi Barat memiliki Private Invest, jumlah GRDP per kapita serta Gov Spending di provinsi ini rendah Sulawesi Barat menjadi Provinsi yang memiliki pengangguran paling rendah.

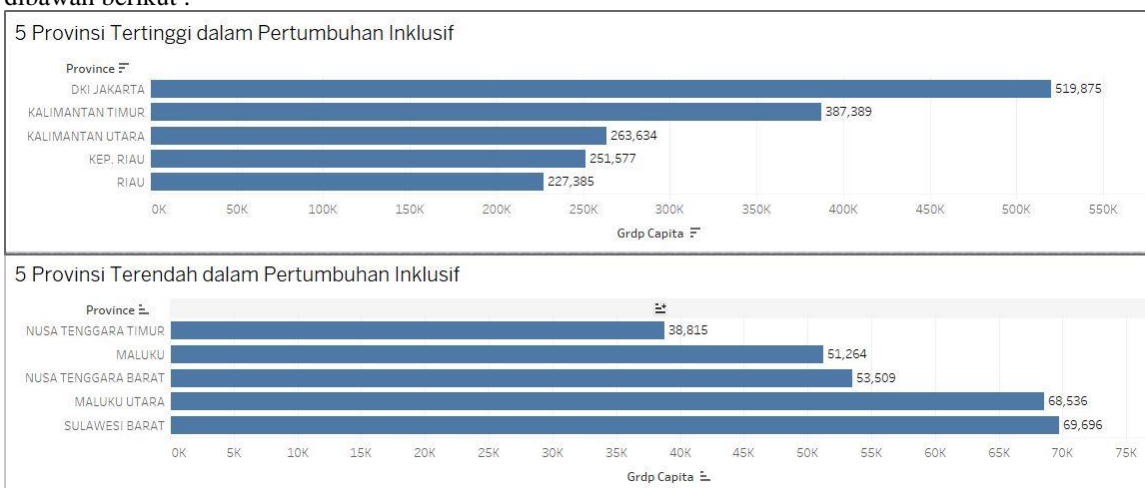
Penurunan pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat ini akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat, karena mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan gaya hidup yang lebih sehat. Peran ganda investasi publik dan swasta berkontribusi pada peningkatan GRDP per kapita secara berkelanjutan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan pendapatan, akses memadai terhadap layanan dasar termasuk kesehatan, dan terbukanya kesempatan ekonomi yang lebih luas.



**Gambar 4.5 Keluhan Kesehatan Terhadap GRDP/Capita**

Pada diagram tersebut Provinsi dengan Jumlah paling banyak untuk Keluhan kesehatan adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah keluhan 130,54 kemudian Nusa Tenggara Timur dengan keluhan kesehatan 104.97 dan DI Yogyakarta dengan Keluhan kesehatan sebanyak 103.94, dimana ketiga Provinsi ini memiliki GRDP per kapita rendah. Keluhan kesehatan dan pendapatan per kapita memiliki hubungan yang erat. Daerah dengan GRDP per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, gaya hidup dan nutrisi yang lebih sehat, lingkungan yang lebih baik, serta kesadaran dan edukasi kesehatan yang lebih tinggi. Semua faktor ini dapat berkontribusi dalam mengurangi keluhan kesehatan masyarakat. Namun, hubungan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur kesehatan, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi inklusif tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, kita melakukan analisis terhadap Gross Regional Domestic Product (GRDP) per kapita. Berdasarkan hasil analisis, peneliti mengidentifikasi lima provinsi dengan pertumbuhan inklusif tertinggi dan terendah sebagai gambar dibawah berikut :



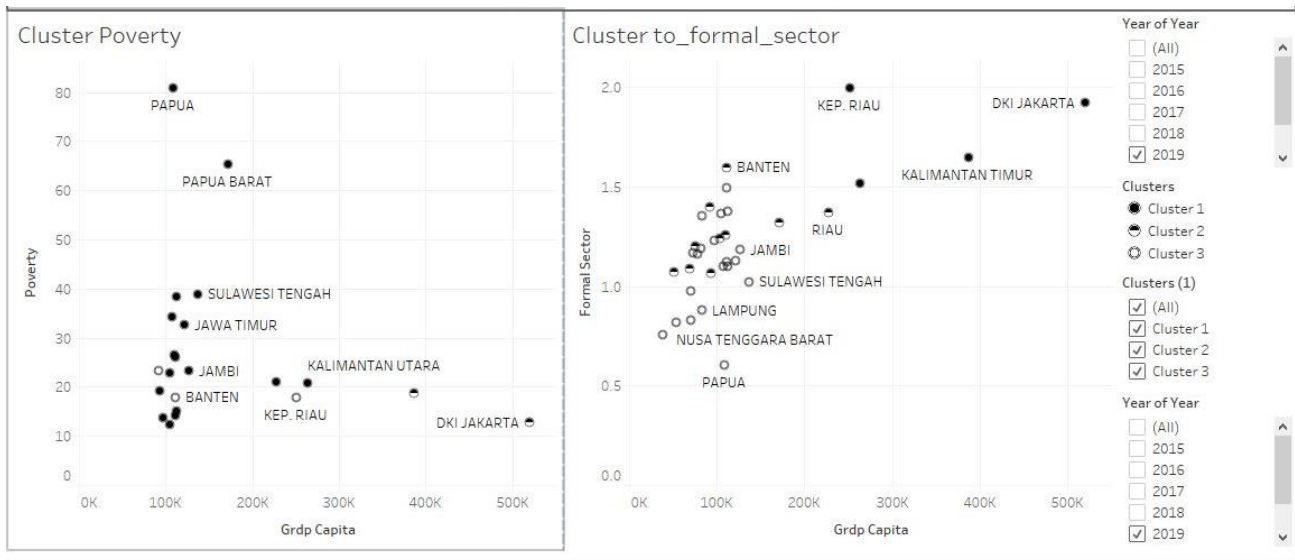
**Gambar 4.6 Analisis Provinsi Tertinggi dan Terendah dalam Pertumbuhan Inklusif di Indonesia**

Dari visualisasi di atas, terlihat bahwa DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Riau adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi inklusif tertinggi di Indonesia. Tingginya GRDP per

kapita di provinsi-provinsi ini menunjukkan bahwa mereka berhasil menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan inklusif. Faktor-faktor seperti tingginya tingkat investasi, baik publik maupun swasta, serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik di provinsi ini, berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Sebaliknya, provinsi dengan pertumbuhan inklusif terendah ditunjukkan oleh visualisasi berikut: Dari visualisasi di atas, terlihat bahwa Nusa Tenggara Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi inklusif terendah di Indonesia. Rendahnya GRDP per kapita di provinsi-provinsi ini menunjukkan bahwa mereka menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Faktor-faktor seperti tingginya tingkat pengangguran, rendahnya investasi, dan masalah kesehatan yang masih tinggi merupakan hambatan utama yang perlu diatasi.

Selanjutnya, penelitian ini memanfaatkan dataset komprehensif yang mencakup Gross Regional Domestic Product (GRDP) per kapita, tingkat kemiskinan, dan kontribusi sektor formal di berbagai provinsi di Indonesia. Analisis kluster dilakukan untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan dalam variabel-variabel berikut ini :



**Gambar 4.7** Dashboard Cluster berdasarkan lapangan pekerjaan dan tingkat kemiskinan

Dua visualisasi utama digunakan dalam analisis ini yaitu Cluster Poverty (Klaster Kemiskinan). pada Grafik ini menunjukkan hubungan antara GRDP perkapita dan tingkat kemiskinan di berbagai provinsi. Setelah Cluster to Formal Sector (Klaster ke Sektor Formal): Grafik ini menunjukkan hubungan antara GRDP per kapita dan partisipasi pada sektor formal.

**Tabel 4.1** Pembagian Cluster

Nama Provinsi	Klaster	GRDP per Kapita	Tingkat Kemiskinan	Partisipasi Sektor Formal
Papua	1	Rendah	Tinggi	Rendah
Papua Barat	1	Rendah	Tinggi	Rendah

Sulawesi Tengah	2	Menengah	Menengah	Menengah
Jawa Timur	2	Menengah	Menengah	Menengah
DKI Jakarta	3	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kepulauan Riau	3	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Berdasarkan analisis pembagian hasil tabel kluster yang didapatkan , provinsi-provinsi tersebut peneliti kelompokkan ke dalam tiga kluster utama yaitu:

1. Kluster 1: Provinsi dengan GRDP per kapita rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Papua dan Papua Barat.
2. Kluster 2: Provinsi dengan GRDP per kapita menengah dan tingkat kemiskinan menengah, seperti Sulawesi Tengah dan Jawa Timur.
3. Kluster 3: Provinsi dengan GRDP per kapita tinggi dan tingkat kemiskinan rendah, seperti DKI Jakarta dan Kepulauan Riau.

Temuan dari analisis ini menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Provinsi dengan GRDP per kapita tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi sektor formal yang lebih tinggi dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Sebaliknya, provinsi dengan GRDP per kapita rendah menghadapi tantangan signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan partisipasi sektor formal. Oleh karena-nya ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dengan cara pada tabel dibawah berikut :

**Tabel 4.2 Strategi Kebijakan**

No	Faktor	Strategi Kebijakan
1	Pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di provinsi dengan kluster kemiskinan tinggi
2	Kesehatan	Meningkatkan layanan kesehatan dasar dan penyuluhan kesehatan di provinsi dengan kluster kemiskinan tinggi
3	Investasi Swasta	Memberikan insentif pajak dan fasilitas investasi di provinsi dengan GRDP per kapita rendah

Pertama, peningkatan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting. Fokus harus diberikan pada peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, terutama di provinsi yang masuk dalam kluster kemiskinan tinggi. Dengan pendidikan yang lebih baik, tenaga kerja dapat meningkatkan keterampilan mereka, sementara layanan kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Kedua, pemerintah perlu mendorong investasi swasta dengan memberikan insentif khusus di provinsi dengan GRDP per kapita rendah. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan partisipasi sektor formal di daerah-daerah tersebut. Insentif ini bisa berupa keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Dan Terakhir peneliti menyarankan pengembangan program-program pengurangan kemiskinan harus difokuskan pada provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi. Program-program ini perlu dirancang secara spesifik untuk mengatasi penyebab kemiskinan

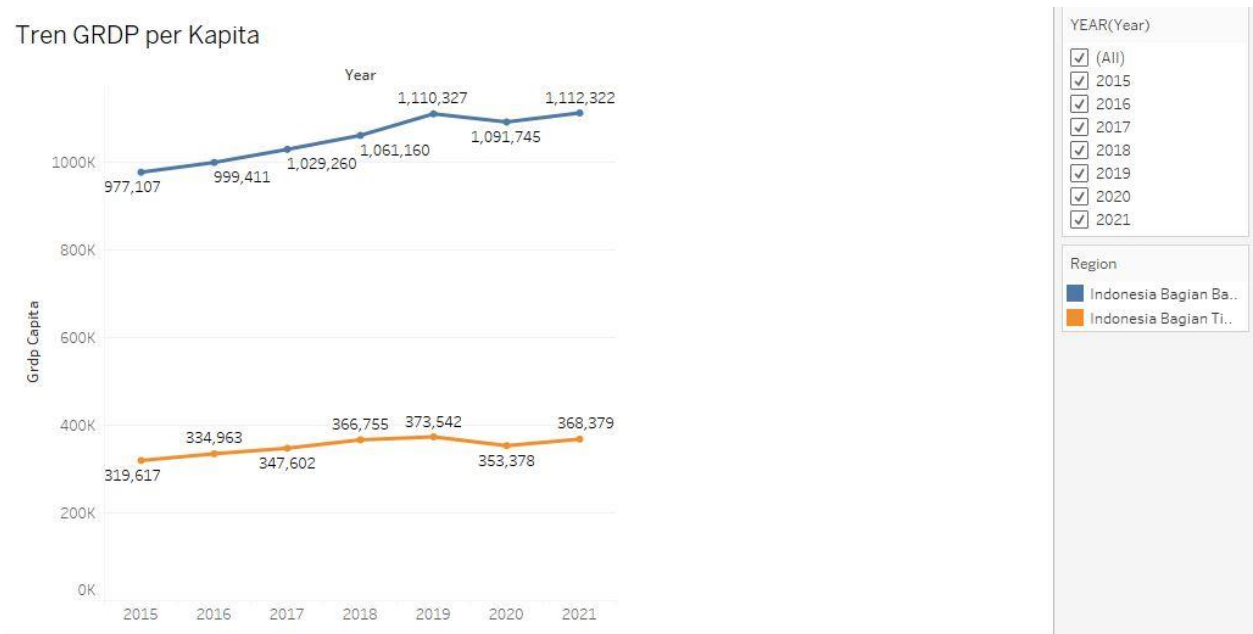
di masing-masing daerah. Misalnya, program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, pemberian bantuan modal usaha kecil, serta penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat tercapai, sehingga kesejahteraan masyarakat di seluruh provinsi Indonesia dapat meningkat.

Selanjutnya peneliti meneliti Tingkat kelulusan SMA dan GDRP per kapita yang dua indikator penting yang dapat memberikan wawasan tentang pertumbuhan inklusif di Indonesia. Pertumbuhan inklusif berarti pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan yang memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Daerah dengan GDRP per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kelulusan SMA yang lebih tinggi karena memiliki sumber daya yang lebih baik untuk mendanai pendidikan. Sebaliknya, tingkat kelulusan SMA yang tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan GDRP per kapita di masa depan, karena pendidikan menengah yang baik menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan inklusif memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk akses yang merata ke pendidikan. Ketika semua provinsi di Indonesia memiliki akses yang sama ke pendidikan berkualitas, hal ini dapat membantu mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Disparitas adalah ketidaksamaan atau perbedaan yang signifikan antara dua atau lebih kelompok atau daerah dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau akses terhadap sumber daya.

Untuk Melihat Trend per Kapita, Trend Keluhan keluhan Kesehatan dan Tren Tingkat pengangguran di Indonesia maka Untuk wilayah dibagi menjadi dua yaitu:

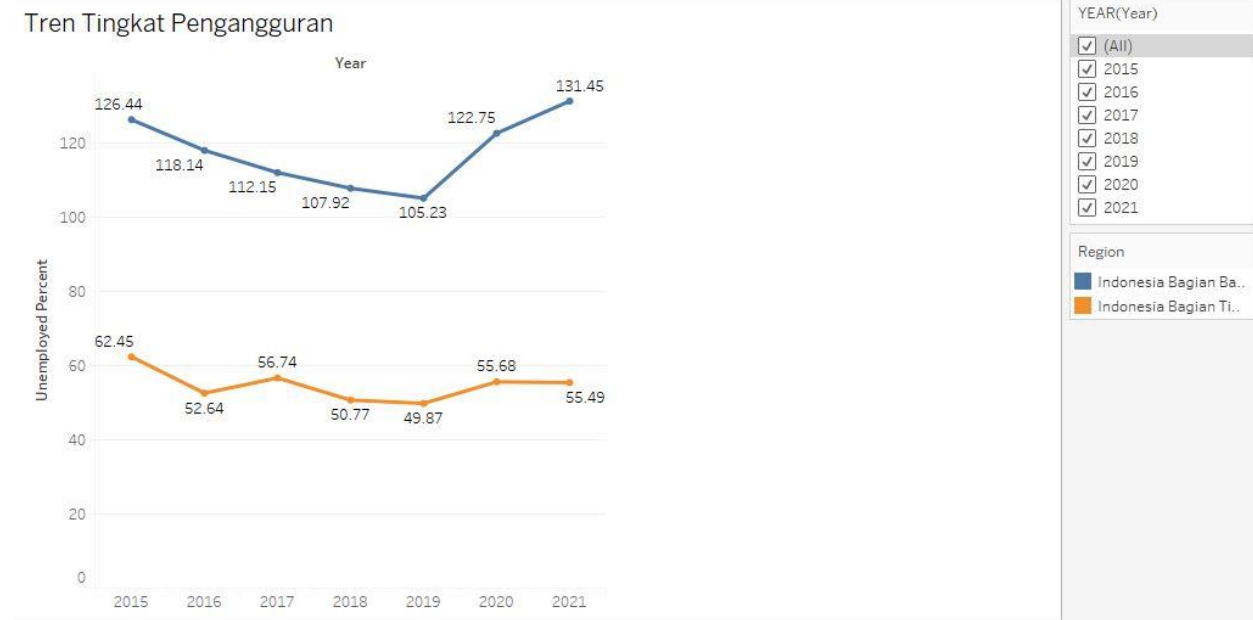
**Tabel 4.3 Pembagian Wilayah Indonesia**

Pembagian Wilayah	Provinsi
Indonesia Bagian Barat	Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep.Bangka Belitung, Kep.Riau, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.
Indonesia Bagian Timur	Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara



**Gambar 4.8 Tren GRDP per Kapita**

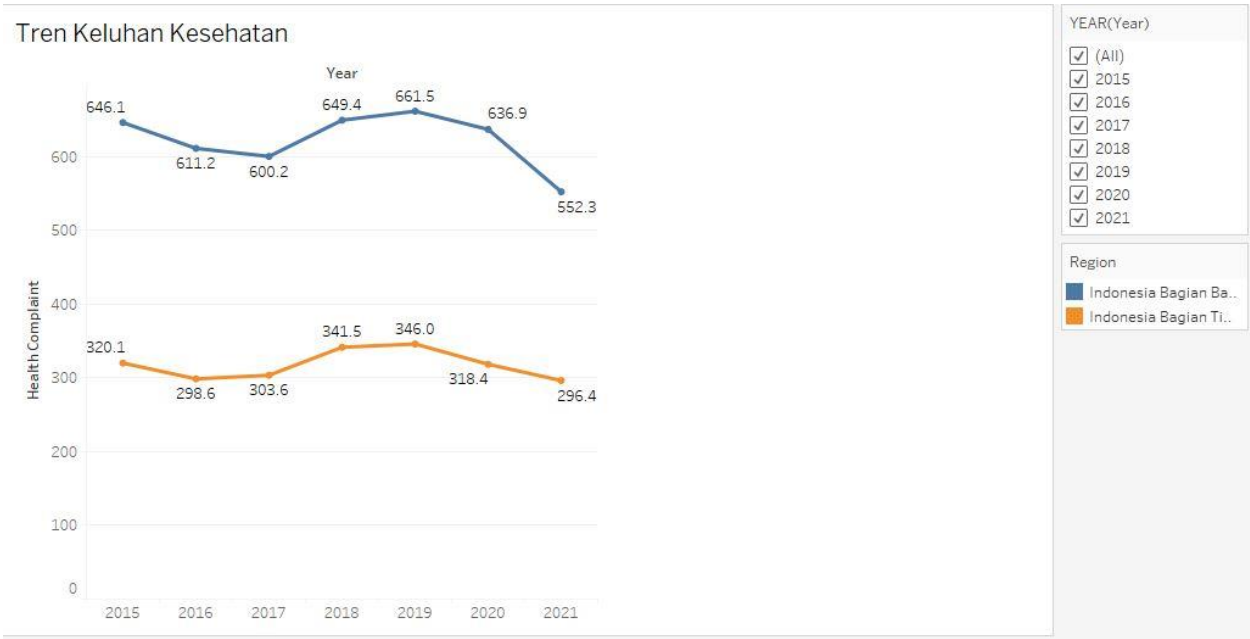
Grafik ini menunjukkan tren GRDP per kapita di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021. Tren keseluruhan GRDP per kapita adalah naik, menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata per orang di negara tersebut meningkat dari waktu ke waktu. Namun, ada juga beberapa variasi dalam tren tersebut, dengan beberapa tahun menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Tahun 2020 menunjukkan penurunan signifikan dalam GRDP per kapita, kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19. Penurunan ini menjadi pengingat bahwa meskipun Indonesia sedang menuju pertumbuhan inklusif, Indonesia masih rentan terhadap guncangan eksternal. Banyak tantangan yang dihadapi dalam naik turunnya Tren, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, air bersih, pendidikan.



**Gambar 4.9 Tren Tingkatan Pengangguran per tahun**

Grafik ini menunjukkan tren tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021. Grafik menunjukkan beberapa tren penting. Garis biru merupakan wilayah Indonesia Bagian Barat, sedangkan orange

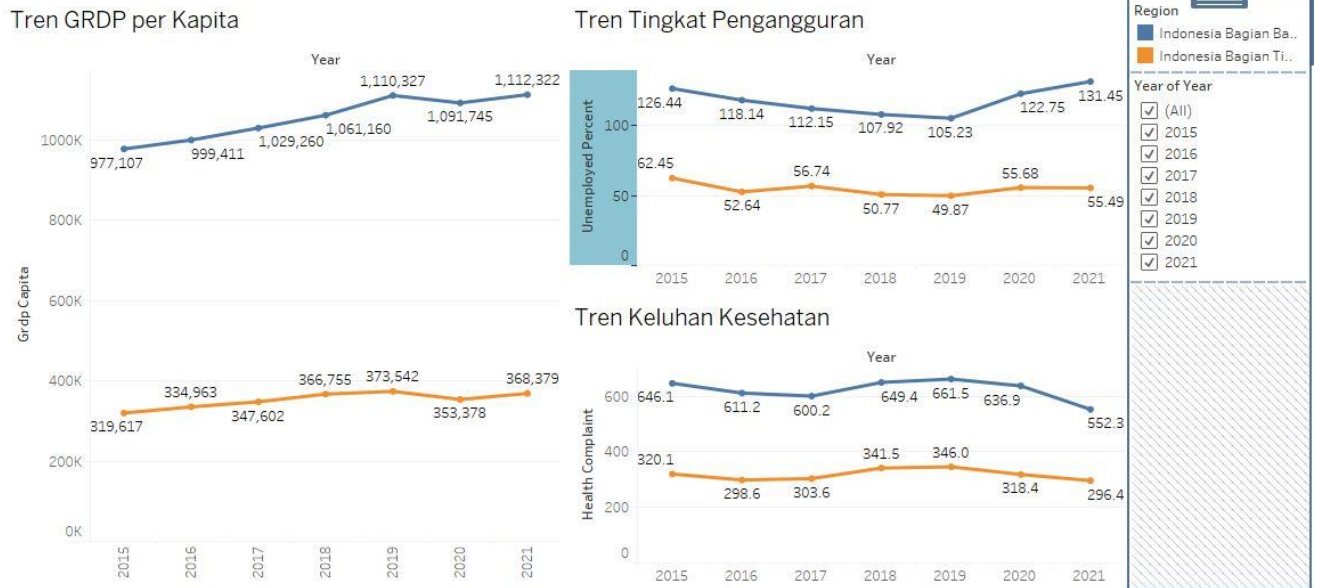
merupakan wilayah Indonesia Bagian Timur. Tingkat pengangguran yang tinggi terdapat di wilayah barat  
**Penurunan Tingkat Pengangguran Secara Keseluruhan:** Secara keseluruhan, tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun 2015 hingga 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi pada ekonomi. **Fluktuasi Tahunan:** Meskipun tren keseluruhan menunjukkan penurunan, terdapat beberapa fluktuasi tahunan dalam tingkat pengangguran. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti krisis ekonomi global atau bencana alam. Tingkat pengangguran merupakan indikator penting bagi pertumbuhan inklusif. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kemiskinan dan ketimpangan.



**Gambar 4.10** *Tren Tingkatan Keluhan kesehatan per tahun*

Grafik ini menunjukan Tren keluhan kesehatan masyarakat di berbagai wilayah, garis biru menunjukkan wilayah indonesia bagian barat, sedangkan yang orange menunjukkan wilayah indonesia bagian timur. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari kedua wilayah tersebut, dapat dilihat keluhan kesehatan banyak terjadi di wilayah barat saja wilayah timur hampir setengahnya. Ini menunjukkan bahwa kesehatan di masing-masing wilayah tidak dapat ditentukan berdasarkan faktor pendapatan mereka, melainkan kesehatan harus dari kesadaran masyarakat sendiri.





**Gambar 4.11 Dashboard Tren Ekonomi dan Kesehatan di Indonesia per tahun**

Gambar diatas ini merupakan dashboard gabungan dari Tren GRDP per kapita, GRDP per kapita di kedua wilayah, Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 hingga 2021, meskipun terdapat beberapa fluktuasi di sepanjang periode tersebut. Di sisi lain, tingkat pengangguran di Indonesia Bagian Barat mengalami tren penurunan yang stabil hingga tahun 2019, namun mengalami peningkatan tajam pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, tingkat pengangguran di Indonesia Bagian Timur cenderung lebih stabil dengan beberapa fluktuasi kecil. Selain itu, keluhan kesehatan di kedua wilayah cenderung menurun secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun. Data ini menunjukkan adanya perbaikan dalam beberapa aspek ekonomi dan kesehatan, namun juga mengindikasikan adanya tantangan yang perlu diatasi, khususnya terkait tingkat pengangguran di Indonesia Bagian Barat pada tahun-tahun terakhir.

## 5. Conclusion

Penelitian ini menganalisis persebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2015 hingga 2021 yang mencakup 34 provinsi. Hasil analisis menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi inklusif antara provinsi-provinsi di Indonesia. Provinsi dengan GRDP per kapita tinggi, seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Riau, cenderung memiliki tingkat partisipasi sektor formal yang lebih tinggi dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Sebaliknya, provinsi dengan GRDP per kapita rendah, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat, menghadapi tantangan signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan partisipasi sektor formal.

Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, investasi publik dan swasta, serta tingkat pengangguran dan kesehatan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Pemerintah perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan dasar, serta memberikan insentif untuk menarik investasi swasta di provinsi dengan GRDP per kapita rendah. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tren GRDP per kapita secara keseluruhan meningkat dari tahun 2015 hingga 2021, namun terdapat fluktuasi dan penurunan signifikan pada tahun 2020 yang kemungkinan disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tingkat pengangguran di Indonesia Bagian Barat menunjukkan tren penurunan yang stabil hingga tahun 2019, namun mengalami peningkatan tajam pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang lebih merata di seluruh provinsi, pemerintah perlu merancang strategi yang komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan spesifik masing-masing daerah, termasuk pengembangan program-program pengurangan kemiskinan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi.

## 6. References

- ADB di Indonesia. (n.d.). Asian Development Bank. Retrieved May 29, 2024, from <https://www.adb.org/id/where-we-work/indonesia/overview-id>
- Amala, R. (2018). Analisis kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah se Sulawesi. *Al-Buhuts*, 14(02), 38–52. <https://doi.org/10.30603/ab.v14i02.887>
- ARTIKEL PEMBANGUNAN & PERTUMBUHAN EKONOMI. (n.d.). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/artikel-pembangunan-pertumbuhan-ekonomi-53>
- Badan Pusat statistik Kota Bandung. (n.d.). Retrieved May 29, 2024, from <https://bandungkota.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto.html>
- bappenas, semeru. (n.d.). *PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF*. Retrieved May 28, 2024, from <https://inklusif.bappenas.go.id/indeks>
- Hendra Andy Mulia Panjaitan, Sri Mulatsih, & Wiwiek Rindayati. (2020). Analisis Dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif provinsi Sumatera Utara. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.8.1.2019.43-61>
- Indonesia, B. P. S. (n.d.-a). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Retrieved May 29, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen%E2%80%932-07-persen.html>
- Indonesia, B. P. S. (n.d.-b). *Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Retrieved May 29, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2016/02/05/1267/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2015-tumbuh-5-04-persen-tertinggi-selama-tahun-2015.html>
- Indonesia, B. P. S. (n.d.-c). *Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Retrieved May 29, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- Iskandar, A., & Saragih, R. (2018). ANALISIS KONDISI KESENJANGAN EKONOMI DAERAH : STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN. *INFO ARTHA*, 2(1), 37–52. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.232>
- Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Subyektif. (n.d.). Retrieved May 29, 2024, from <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/ketahanan-pangan-dan-kesejahteraan-subyektif>
- Klasen, S. (n.d.). *Measuring and monitoring inclusive growth: Multiple definitions, open questions, and constructive proposals*.
- Negara, D. J. K. (n.d.-a). *Kebijakan Publik DJKN dan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing*. Retrieved May 29, 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalselteng/baca-artikel/13355/Kebijakan-Publik-DJKN-dan-Ekonomi-yang-Inklusif-dan-Berdaya-Saing.html>
- Negara, D. J. K. (n.d.-b). *Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi akibat pandemi covid-19*. Retrieved May 29, 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>
- Negara, K. S. (n.d.-a). *Kewirausahaan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi*. Sekretariat Negara. Retrieved May 29, 2024, from [https://www.setneg.go.id/baca/index/kewirausahaan\\_umkm\\_dan\\_pertumbuhan\\_ekonomi](https://www.setneg.go.id/baca/index/kewirausahaan_umkm_dan_pertumbuhan_ekonomi)
- Negara, K. S. (n.d.-b). *Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju*. Sekretariat Negara. Retrieved May 29, 2024, from [https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan\\_pembangunan\\_infrastruktur\\_dan\\_indonesia\\_maju](https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju)
- Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. (n.d.). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Retrieved May 29, 2024, from <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>
- Pendapatan perkapita: Pengertian, Fungsi, Komponen, & Contoh*. (n.d.). Retrieved May 29, 2024, from <https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/23/pendapatan-perkapita-adalah>
- PPN/Bappenas, K. (n.d.-a). *Beranda*. Kementerian PPN/Bappenas. Retrieved May 29, 2024, from <https://www.bappenas.go.id/>
- PPN/Bappenas, K. (n.d.-b). *Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Mengentaskan Kemiskinan dan Ketimpangan Di Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas. Retrieved May 29, 2024, from <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/pertumbuhan-ekonomi-inklusif-mengentaskan-kemiskinan-dan-ketimpangan-di-indonesia>

- Rehal, V. (2023, December 13). *Inclusive development: Meaning and features - SPUR ECONOMICS*. SPUR ECONOMICS - Learn and Excel. <https://g.co/kgs/y448wBj>
- Soleh, A., & Suwarni, S. (2023). Inclusiveness of economic growth in Indonesia: The poverty approach. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 804. <https://doi.org/10.29210/020231783>
- Sri Hartati, Y. (2021a). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74>
- Sri Hartati, Y. (2021b). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74>
- Suryanarayana, M. H. (2008). Inclusive Growth: What is so Exclusive About it? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1297689>
- TEORI DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN. (n.d.). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Retrieved May 29, 2024, from <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-dan-indikator-pembangunan-12>
- Zasriati, M. (2022). ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN PERKAPITA DAN PEMBENTUKAN MODAL TERHADAP PEREKONOMIAN DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2016-2020. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(1), 41–50. <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i1.1134>
- (N.d.). <https://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku%20pembangunan%20ekonomi%20contoh%20fix.pdf>